

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
KULI ANGKUT GETAH KARET
(Studi di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**DADI SATRIA PANCA NUGRAHA
NPM.1721030143**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
KULI ANGKUT GETAH KARET
(Studi di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**DADI SATRIA PANCA NUGRAHA
NPM.1721030143**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Anis Sofiana. M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pembeli karet sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Namun di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdapat kuli angkut, diantara kuli angkut ada yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian. Islam mengajarkan bahwa dalam upah-mengupah harus sesuai dengan perjanjian di awal, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 bahwa seseorang harus memenuhi akad-akad, Oleh sebab itu peristiwa yang terjadi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan ajaran islam terdapat kesengajaan yang harus ditentukan hukum islamnya.

Rumusan masalah dengan penelitian ini ialah (1) Bagaimana praktik upah kuli angkut getah karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengupahan kuli angkut getah karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, *Field Research* yang bersifat deskriptif analisis serta data primer didapat dari wawancara langsung kepada kuli angkut getah karet yang berada di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Sedangkan data sekunder didapat dari hasil penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Praktik Pengupahan yang dilakukan pembeli karet adalah dengan membuat sebuah perjanjian harga sesuai dengan banyak nya berat yang dipikul (2) Tinjauan dalam hukum islam tindakan pihak pembeli karet dalam mengupah kuli angkut getah karet adalah suatu hal yang tepat dan telah mengikuti hukum islam yang berlaku seperti dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ijarah. Dan pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian upah ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadi Satria Panca Nugraha
NPM : 1721030143
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut Getah Karet ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis,



Dadi Satria Panca Nugraha
17210300143



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

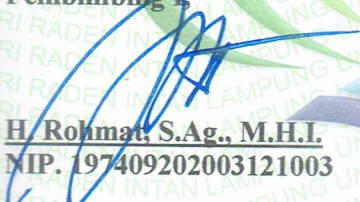
PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut
Getah Karet (Studi di Desa Bandar Dalam, Kecamatan
Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan)
Nama : DADI SATRIA PANCA NUGRAHA
NPM : 1721030143
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II,


Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Khoiruddin M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut Getah Karet (studi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)"** disusun oleh, **Dadi Satria Panca Nugraha**, NPM: **1721030143**, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*muamalah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 22 oktober 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

(الزمر/39:39)

“ Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Az-Zumar : 35)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Saidi Muhammad dan Ibu Yulia Farida tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terima kasih telah merawat saya sampai bisa ketitik ini sehingga saya bisa lulus dan memakai toga nantinya dengan bangga, terima kasih atas segala usaha dan dukungan yang diberikan untuk saya dapat mengerjakan skripsi ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakakku Yudi Aria Bone, Dedy Irawan, Dian Amelia Sari, Tedy Ria Atmaja terima kasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.
3. Seluruh keluarga, dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pendidikan

RIWAYAT HIDUP

Dadi Satria Panca Nugraha, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Februari 1999, anak kelima dari pasangan Bapak Saidi Muhammad dan Ibu Yulia Farida. Pendidikan dimulai dari TK Bhayangkari selesai pada tahun 2005, SDN 02 Palapa dan selesai pada tahun 2011, SMPN 09 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, SMAN 10 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut Getah Karet (Studi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah, atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I.masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, dan para StaffKaryawan akademik fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan dan Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta pengelola perpustakaan yang telah memberi informasi, data refrensi dan lain-lain.

7. Pemilik Kebun Karet dan Kuli Angkut, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan
 8. Agie Tri Grahita yang selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
 9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Muamalah H, Bigboss Squad.
- Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Signifikasi Penelitian.....	4
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	4
H. Metode penelitian.....	7
I. Sistematika pembahasan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 11
A. Akad Menurut Hukum Islam.....	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	11
2. Rukun dan Syarat Akad.....	14
3. Macam-Macam Akad	17
4. Prinsip-Prinsip Akad	17
5. Berakhirnya Akad	19
B. Upah Menurut Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Upah	19
2. Dasar Hukum Upah	23
3. Rukun dan Syarat Upah.....	28

4. Macam-Macam Upah	33
5. Hak Menerima Upah	34
6. Waktu Pemabayaran Upah	35
7. Sistem Pembayaran Upah dan Batalnya Upah.....	36
8. Berakhirnya Upah	37
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran umum Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.....	49
1. Sejarah Lahirnya Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung.....	49
2. Visi dan Misi Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung.....	50
3. Letak Geografis Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung.....	51
4. Keadaan Demografis Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung.....	51
B. Pelaksanaan Praktik Pengupahan kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung	55
BAB IV ANALISIS DATA	59
A. Pengupahan Kuli Angkut Karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.....	59
B. Tinjauan hukum islam dalam pengupahan kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 JumlahPenduduk Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	50
3.2 Penduduk Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Suku	52
3.3 Penduduk Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Mata Pencaharian	52
3.4 Penduduk Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Agama	53
3.5 Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Way Kanan Kabupaten Way Kanan	54
3.6 Penduduk Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul skripsi ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas ***(Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Angkut Getah Karet)*** berikut istilah yang akan dibahas ialah :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya¹.
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam².
3. Pengupahan adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di tetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja³.
4. Angkut adalah mengangkat dan membawa atau mengirimkan ke mereka⁴.
5. Getah adalah istilah umum untuk menyebut cairan kental yang keluar dari tubuh, baik tumbuhan maupun hewan⁵.
6. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan.

¹Departement Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470

²M. Hasbi Assidqy, falsafah Hukum Islam, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002), 41

³ Peraturan perundang-undang Upah dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing. 2006), 1

⁴ "Pengertian kebun"(online) kbbi.web.id/kebun(18 Desember 2020)

⁵ "Pengertian harga"(online) kbbi.web.id/harga(18 Desember 2020)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah Pengupahan Kuli Angkut Getah Karet (Studi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan) yang mana penelitian ini menjelaskan kepada pengupahan terhadap kuli atas pengupahan yang didapatkan dari pembeli karet (toke) dengan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorangpun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pergaulan dalam hidupnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan juga sebaliknya. Sehingga sering kali butuh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak.

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah⁶. Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan.

Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Jasiah: 22, Allah SWT berfirman:

⁶ Hendi Suhendi.Fir///? *Muamalah*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010),

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

(الجاثية/22)

"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan". (Q.S.Jasiah:22)

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya. Islam menjelaskan apabila memperkerjakan seseorang hendaklah memberikan upahnya sebelum kering keringatnya.

Masyarakat biasanya dalam mengupah pekerja tidak ada kesepakatan sebelumnya, seperti yang terjadi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan. Upah bagi jasa upah angkut karet di daerah tersebut tidak ditentukan di awal namun pembagiannya ditentukan setelah terjualnya karet tersebut. Hal ini membuat ketidakjelasan upah bagi pekerja kuli angkut tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menganggap masalah ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang upah angkut karet berdasarkan harga pasar (Studi Kasus LahanKaret di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan)".

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan fokus dan tujuan penelitian, Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan upah

kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upah kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan kuli angkut Getah karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan kuli angkut lahan karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum islam, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang sistem pengupahan kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.
2. Studi ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat tentang status hukum islam mengenai sistem pengupahan dan memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan terlebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi HERMAWAN (2020) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkutan Sampah" adapun

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengambilan upah terhadap pengangkut sampah di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengambilan upah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengambilan upah terhadap pengangkut sampah dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah Di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengambilan upah yang dilakukan petugas pengangkut sampah berbeda-beda ada yang Rp.20.000-50.000 setiap bulannya, padahal mereka sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah daerah kota bandar lampung. Pengambilan upah ini tidak ada kesepakatan di awal pengangkut sampah meminta sesuai hati kepada masyarakat yang apabila tidak mau membayar sesuai yang diminta pengangkut sampah maka mereka tidak mau mengambil sampah tersebut. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap pengambilan upah tersebut tidak diperbolehkan karena ada unsur paksaan terhadap masyarakat dan juga tidak ada akad di awal antara petugas pengangkut sampah dan masyarakat hanya di putuskan oleh sebelah pihak saja.

Perbedaan yang dapat diambil dari penelitian penulis dan skripsi Hermawan adalah dari suatu objek penelitiannya dan perjanjian upah skripsi Hermawan menjelaskan bahwa upah petugas pengangkut sampah lebih murah pengupahannya dibandingkan dengan upah pengangkut karet.⁷

2. Skripsi Firda Aricahyani (2019) dengan judul “Sistem Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”(Studi Kasus di Pasar Wage TulungAgung). Tinjauan judul ini mempunyai fokus penelitain yaitu bagaimana sistem pemberian upah pekerja di pasar Wage Tulungagung,

⁷Hermawan’Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkutan Sampah”(Skripsi,UIN Raden Intan Lampung)

bagaimana sistem pemberian upah dalam perspektif ekonomi Islam, dan bagaimana pemberian upah dalam kaitannya dengan kesejahteraan pekerja. Kesimpulannya adalah Sistem pemberian upah untuk pegawai toko dan tukang parkir menggunakan sistem upah jangka waktu, yaitu upah dibayarkan menurut jangka waktu yang disepakati di awal kerja, mingguan atau bulanan. Sedangkan untuk kuli angkut menggunakan sistem upah potongan, yaitu barang yang akan diangkut dihitung beratnya dan upah dibayarkan langsung setelah pekerjaannya selesai.

Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitiannya dan ketidaksesuaian pemberian upah dari pemerintah untuk ke setiap pekerja sedangkan penelitian saya sistem pengupahannya diberikan oleh pemilik lahan bukan dari pemerintah.⁸

3. Skripsi Reni Anggriyani (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliputi Berita Di Masyarakat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upah bagi wartawan dalam meliput berita Lipan Lampung Utara dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam bagi wartawan dalam meliput berita bagi wartawan Lipan, Lampung Utara. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memperoleh berita wartawan Abung Barat sengaja mencari kesalahan pada masyarakat untuk dijadikan berita, kemudian dari berita tersebut wartawan memanfaatkan keadaan untuk memperoleh upah, tentunya hal tersebut merupakan hal yang dilarang dan dapat dijerat dengan tindak pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam ajaran ajaran Islam hal tersebut juga merupakan suatu hal yang dilarang dan bersifat haram, sebab

⁸Firda AricahyanrSistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya Dengan Kesejahteraan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam "(Skripsi, IAIN TulungAgung)

dalam memperoleh berita tersebut wartawan tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah atau upah dan telah melanggar kode etik wartawan sebagai wartawan, untuk menerima upah dan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sama saja seperti menyebar aib seseorang.

Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan perbedaan menerima pengupahannya yaitu skripsi Reni Anggraini menjelaskan bahwa upah didapatkan dengan mencari informasi berita yang ada di masyarakat sedangkan penelitian saya menjelaskan bahwa sistem upah diberikan dengan seberapa banyak getah karet yang diangkut ke dalam truk mobil⁹.

H. Metode Peneletian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang di hadapi serta mencakup alat dan prosedur penelitian¹⁰. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari referensi buku, jurnal media elektronik, internet dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁹Reni Anggriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan dalam Meliputi Berita di Masyarakat” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

¹⁰Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu :

a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa wawancara serta hasil observasi dari pekerja kuli angkut di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa wawancara serta hasil observasi dari pekerja kuli angkut di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan karet dan pekerja kuli angkut yang ada di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung. Dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 8 orang yang terdiri 1 pembeli getah karet 1 anak pemilik lahan karet dan 6 kuli angkut getah karet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung kepada pekerja pabrik penggilingan padi terkait bagaimana praktik pelaksanaan

akad dan upah mengupah tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari Hukum Islam .

b. Observasi

Adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian .

c. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh kelengkapan data yang diperoleh melalui dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Adalah pengoreksian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengecek data yang terkumpul sudah benar dan lengkap serta sesuai dengan permasalahan.

b. Sistematisasi

Adalah menetapkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasa dengan fokus pada urutan masalah. Data dikelompokkan secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu akad pengupahan kuli angkut karet dan ditinjau pengupahan dari hukum islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif .

Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah mengupah sebagaimana yang ada dalam hukum islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori, membahas tentang pelaksanaan upah dalam islam serta pengertian dari upah.

Bab III, penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang sejarah berdirinya kebun karet, letak geografis, visi misi dan pengelola kebun karet serta bagaimana pelaksanaan pengupahan kuli angkut.

Bab IV, analisis data, menjabarkan pelaksanaan upah angkut getah karet terhadap pemilik kebun karet serta pandangan hukum islam terhadap pengupahan.

Bab V, kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesainya skripsi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, dan permufakatan.¹¹ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Secara etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti, antaralain: ¹²

- Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung dikemudian menjadi potongan benda.
- Sambungan(*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ (ال عمران 76-76)

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Imron :76)

Istilah *ahdu* dalam al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji

¹¹ Nasrun Harun Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama,2007), 97

¹² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101

yang dibuat orang tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang menepai janjinya siapapun orang nya.¹³

Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (المائدة/5: 1-1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1)

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Kata akad menurut istilah terkadang digunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau dengan orang lain dengan kata harus, yakni saling mengikat antar kedua pihak yang melakukan akad atau perjanjian yang telah dilah disepakati bersama sebelumnya.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, upah. Secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dengan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam

¹³ Sohari Ru’fah, Fiqh Muamalah, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 42

hukum Islam. Kata akad berasal dari kata: “ahdu” yang berarti janji sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٧٦﴾ (آل عمران/3: 76-76)

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Imran: 76)

يٰۤبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ (البقرة/2: 40-40)

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)”. (Q.S. Al-Baqarah: 40)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴿٣٤﴾ (الاسراء/17: 34-34)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”. (Q.S. Al-Isra: 34)

Istilah ‘ahdu dalam Alquran mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut,

seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran diatas bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.¹⁴

‘*Aqdu*, yang berarti sambungan, yaitu menyambung atau menghubungkan dan mengikatnya.¹⁵ Perkataan „*aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhbungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*aqdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqdu*).

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut¹⁶.

1) Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari . . . dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:

a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baliq dan berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan yang buruk.

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Mualah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 45

¹⁵ Ibid, 45

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 46

- b) Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikanya.
- 2) *Ma''qud* alaih ialah benda –benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu'* al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al 'aqd* ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab qabul.

a) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus saling mengerti satu sama lain ucapan masing-masing serta menunjuk keridhaanya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan Isyarat

Akad dengan isyarat digunakan bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan menggunakan akad lisan atau tulisan.

d) Akad dengan Tulisan

Akad dengan tulisan diperbolehkan digunakan bagi orang yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu

berbicara dengan syarat tulisan itu harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.¹⁷

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al 'aqd* ialah:

- a) *Sighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, hal yang termasuk dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang berijab dengan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

b. Syarat Akad

Setiap pembentukan Aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) akad itu akad yang tidak dilarang oleh syara.
- 5) akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka jika jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya kabul maka batal ijab nya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut batal.

¹⁷ Rachmat Syafei, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 46

¹⁸ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44

3. Macam-macam Akad

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu''alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

4. Prinsip –prinsip Berakad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip dalam ber-akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Prinsip Kebebasan berakad
Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak merugikan pihak lain atau makan harta sesama dengan cara bathil tetapi dengan jalan muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
- b. Prinsip Perjanjian itu mengikat
Allah telah menganjurkan pada manusia dalam melakukan perjanjian harus tertulis dan adanya saksi supaya mengikat sebagaimana sebuah perjanjian akad yang didalam nya terdapat hak dan kewajiban masing masing.

وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنْتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا فَلْيَلَا ﴿٧٤﴾ (الاسراء/17: 74-74)

¹⁹ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, 21

“Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu Hampir-hampir condong sedikit kepada mereka (Q.S. Al-Isra: 74)

c. Prinsip Ibadah

Prinsip ini yakni segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Maksudnya adalah semua perbuatan muamalah manusia selain untuk memenuhi kebutuhan juga ditujukan untuk beribadah, sebab hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah.

d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Hukum perjanjian Islam harus menekankan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, antara hak dan kewajiban dan tidak ada kezaliman serta pihak yang dirugikan yang terjadi dalam suatu perikatan atau perjanjian. Adil merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut dalam Al Quran sehingga Allah menekankan perilaku adil kepada umat Islam.



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8)

- e. Prinsip Kemaslahatan
Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang melakukan perjanjian dan tidak memberatkan atau menimbulkan dampak kerugian.
- f. Prinsip kejujuran
Masing-masing pihak harus beritikad baik termasuk jujur dalam bertransaksi dengan pihak lain serta tidak saling mengeksploitasi pihak lainnya.

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:²⁰

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya menikat, suatu akad dianggap berakhir apabila: (a) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*, secara terminology ikata *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang

²⁰ Syamsul Anwar, Fiqih Muamalah, 35

berarti *al-ijwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²¹

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan didunia.²²

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²³

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari hak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁴

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15

²² A. Riawan Amin. Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan: Penerbit hikmah (PT Mizan Publika), 2010), 145

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387

²⁴ Taqyuddin An-nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81

tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan, salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan kaidah hukum.²⁵

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek dalam ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad ijarah kadangkadang menganggap benda adalah objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda akan tetapi juga bisa berasal dari manusia baik tenaga fisiknya maupun kemampuan lain dari manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.²⁶

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²⁷ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

²⁵ Salim H.S., *Hukmu Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 4

²⁶ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 180

²⁷ Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), 361

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.²⁸

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “Ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian(bayar)”.²⁹ Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).
- b. Menurut Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa ‘*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.³⁰
- c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah ‘*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.
- d. *Ibnu khaldun* menyatakan bahwa, didalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal itu sesai dengan pemikiran *ibnu khaldun* yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas sosial.³¹ Allah menciptakan semua yang ada di dnia ini untuk manusia, dan manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada didunia ini. Tapi sekali seseorang telah memiliki barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan seseorang tersebut harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu maka

²⁸ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 227

²⁹ Abdurahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba’ah Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 94

³⁰ Ibid, 98

³¹ Rachmad syafei, Fiqih Muamalah, 65

penghasilan yang diperoleh orang dari pekerjaan merupakan nilai dari kerjanya. Nilai setiap orang terletak pada keahliannya oleh karena itu upah pekerja yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hamper sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mua'jir oleh seorang musta'jir yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad al-*ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-*ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-*ijarah* hanya ditunjukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek al-*ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajianya (upahnya) satu kali dalam sebulan". Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³²

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

Kebanyakan Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak

³² Hendi Suhendi, 115

menyepakatinya, seperti *Abu Bakar Al-Asham* dan *Ibnu Ulayyah*. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).³³

Jumhur Ulama Berpendapt Bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma'

a. Al-Quran Surat Al-Qahash ayat 26-27

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضَةَ فَمَا فَوْقَهَا فَمَا
الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (البقرة/2: 26-27)

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan

³³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), 123

kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qahash: 26-27)

b. Al-Quran Surat Thalaq ayat 6

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا يَنبَغْكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ (الطلاق/65: 6-6)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan

jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁴

c. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ (النحل/16: 97-

(97)

“ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S.An-Nahl: 97)

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram.

Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

d. As-Sunnah

Selain ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW antara lain adalah:

³⁴ Ahmad Musthofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللّٰهُ رَضِيَ عَنَّا ابْنِ وَعَنْ
مَا أَحَقَّ إِنَّ) وَسَلَّم عَلَيْهِ
الْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ (اللّٰهُ كِتَابُ حَقًّا عَلَيْهِ أَخَذْتُمْ

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah" [HR. al-Bukhari]"³⁵

e. Ijma

Islam pada masa sahabat telah berijma” bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma*” ini. Sebagai mana di ungkapkan *Sayyid Sabiq*: “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma*” para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶ Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama”.³⁷ *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”³⁸

³⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah. *al-Jami' al-Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulullah SAW wa Ayyaam*, (Beirut: Dar Thuq al-Najjah. 1422 H), cet. ke-1, 577

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 18

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 165

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117

3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.³⁹

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.⁴⁰

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) Aqid (Orang Yang Berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang menerima upah dan menyewakan disebut mu'ajjir dan orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴¹

³⁹ Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303

⁴⁰ Chairuman Pasaribu Surwadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53

⁴¹ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 117

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul- 'aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴²

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya dari mu'ajjir.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang musta'jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁴³

b. Syarat Upah (Ijarah)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa- menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa- menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), 178

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 231

⁴⁴ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

1) Pelaku Ijarah Haruslah Berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan Pihak Yang Berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4: 29-29)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.An-Nisa 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁴⁵

- 3) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 4) Objek al-ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”

- 5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan

⁴⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007),

sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan Manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi, hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang diketahui.

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁴⁶

e) pembayaran (Uang Sewa) Seharusnya bernilai dan jelas pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak

f) Ma'qud, Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara Tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab tidak dibenarkan syara'.

g) Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara'

Pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti

⁴⁶ Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37

menyewa rumah untuk ditempati atau menyewa jaring untuk berburu dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang ijarah baik benda ataupun barang untuk keperluan maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

- h) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa ramadhan, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa ibu untuk menyusui anak kandung nya sendiri sebab itu adalah kewajibanya.

- i) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk diijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.⁴⁷

4. Macam-macam Upah

Upah dalam fiqih muamalah diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya dan ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan pihak-pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*Ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kondisi kerjanya (profesi kerja).

Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua:

- a. Ijarah manfaat (*iharah ala al-manfa'ah*), seperti sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan alat-alat kerja. Dalam hal ini mu'ajir mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* membutuhkan benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat

⁴⁷ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 128

imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda-benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b. Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah al al-a'mal*), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang dengan melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut Ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, kuli angkut, buruh tani. Mu'ajir dalam hal ini adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mua'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan, *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mua'jir*.⁴⁸ *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁴⁹
- c. Ijarah khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- d. Ijarah musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

5. Hak Menerima Upah

Hak dalam Ijarah adalah kewajiban untuk memberikan pada waktu yang telah disepakati. secara umum dalam ketentuan Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل/16: 90-90)

⁴⁸ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 236

⁴⁹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Penerbit Dana Bakti Wakaf)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S.An-Nahl: 90)

Ayat diatas jika dikaitkan dengan perjanjian kerja atau perjanjian upah mengupah maka dapat ditemukan bahwa Allah memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, bijaksana serta dermawan kepada pekerjanya disebabkan pekerja memiliki andil yang cukup besar dalam kesuksesan usaha dari pemberi pekerjaan, maka wajib memberi upah dengan adil kepada pekerjanya terutama dalam hal kelayakan upah.⁵⁰

6. Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaan tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk lain seperti barang, tetapi dengan nilai yang sesuai dan telah disepakati.⁵¹ Waktu pembayaran upah tentunya harus sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama, bisa dibayarkan diawal akad atau dibayarkan saat pekerjaan selesai. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara antara pekrja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaanya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika seorang pekerja tidak menunaikan kewajibanya atau dengan sengaja menunaikan pekerjaanya dengan tidak semestinya, maka dapat

⁵⁰ Djumadi, Hukum Perburuhan, 79

⁵¹ Ibid, 81

diperhitungkan pemotongan upah sebab setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

7. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (Ijarah)

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *mustajir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵²

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pda saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *mua'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesa.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat

⁵² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 121

barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁵³

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *mu'ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *mu'ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Jika benda ada ditangan *mu'ajir*
- 2) Jika ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut
- 3) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *mu'ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- 4) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

8. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:⁵⁵

⁵³ Ibid, 26

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 133-134

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Akad sewa menyewa akan berakhir ketika hal-hal berikut terjadi:⁵⁶
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
 - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

⁵⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 237

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Muamalah, 34

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁵⁷

Upah berhak diterima dengan syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu,

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 236

maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Upah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.⁵⁸

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula.

Upah mengupah atau *Ijarah 'al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'al-a'mal* terbagi dua yakni:⁵⁹

- a. *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditepat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

⁵⁸Taqyudin An,Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1960), 103

⁵⁹Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), 361

- b. *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain.

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi '*ain*).
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
 - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun

terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Akad melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak adalah melakukan pekerjaan. *Ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban objeknya adalah manfaat dan jasa yang didalamnya tidak boleh adanya unsur-unsur yang dapat merusak kontrak tersebut yaitu:

a. Keterpaksaan

Bila ada keterpaksaan dari salah satu pihak tentu saja ini sama saja dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil dan melukai salah satu pihak.

b. Adanya unsur penipuan, penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan informasi secara palsu dan tidak memberikan keterangan secara jelas.

c. Penyamaran cacat objek, penyamaran ini dimaksudkan agar salah satu pihak tidak mengetahui salah satu kekurangan dari objek tersebut.

d. Tidak adanya keseimbangan objek dan harga.⁶⁰
 Dalam hubungan interaksi antar sesama manusia, haruslah berjalan dengan baik yang tunduk kepada syari'ah Islam atau yang keluar dari ketentuan kepadanya yang tidak terbatas.

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang
- b. diharamkan dan dilarang dalam Islam.
- c. Adanya unsur riba dalam transaksi tersebut.
- d. Adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*).
- e. Adanya unsur penipuan, kecurangan.

⁶⁰ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 324

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijârah akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁶¹
- c. Menurut ulama Hanâfiyah berpendirian bahwa akad Ijârah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad ijârah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.⁶²

Kemudian, upah bisa gugur apabila kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 85

⁶² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1),350.

Ulama Hanâfiyah berpendapat gugurnya upah adalah: ⁶³

- a. Jika benda ada ditangan ajir
 - 1). Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2). Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Transaksi ijârah juga bisa tidak sah apabila tidak adanya keridhaan antar dua pihak yang melakukan akad, seperti dalam kaidah ushûliyah dijelaskan:

“Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam suatu transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.

Sistem akad dalam pengupahan pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad Secara etimologi akad berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”. ⁶⁴ Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuquha Malikiyah Syafi’iyah, dan Hanabiah

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al ma’arif, 1987), 27

⁶⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

adalah: “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn”.

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”⁶⁵ Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

1. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada maka menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

a. Rukun Akad

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Maqud alaih ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad
- 3) Maudhu al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad (akibat hukum)
- 4) Shighat ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

⁶⁵ Ibid, 44

b. Syarat Akad

- 1) Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (mukallaf).
- 2) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan, sesuai syariat, harus jelas dan halal.
- 3) Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Dilakukan ditempat penyerahan yang jelas
- 5) Harus bermanfaat serta memiliki tujuan akad yang jelas dan diakui syara'
- 6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.

2. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:⁶⁶

a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagimenjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996),

yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil.

Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut Rahmat Syafe'i, akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan), akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati, pada akad ghair lazim yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain.

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (1) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (2) berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah, (3) akad itu tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak dan (4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an QS. Al-Jaatsiyah ayat 22

Abdurahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991),

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Penerbit Dana Bakti Wakaf)

Ahmad Musthofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984),

Alfaruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989),

A. Riawan Amin. Sc., Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010),

Burhan Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Chairuman Pasaribu Surwadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2*. Jakarta: Balai Pustaka , 1995

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Djumadi, Hukum Perburuhan, (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 1995),

- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2013),
- Ghufran A.mas“adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Helmi Karim,Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997),
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga),
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
- M.Hasbi Assidqy, *falsafah Hukum Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* : Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah. al-Jami’ al Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulullah SAW wa Ayyaam, (Beirut: Dar Thuq al Najjah. 1422 H), cet. ke-1,
- Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari“ah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
- Moh. Saefulloh, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya, Terbit Terang, 2005),

- M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007),
- Nasrun Harun Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007),
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, 2013
- Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutikno, *strategi Belajar Mengajar*.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000),
- Salim H.S., *Hukmu Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1987),
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
- Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979),
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian. Petunjuk praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Syamsul Anwar, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
- Taqyuddin An-nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Lain-lainnya

Firda Aricahyanf "Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya Dengan Kesejahteraan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, IAIN TulungAgung)

Hermawan "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkutan Sampah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

Peraturan Perundang-Undang Upah dan Pesangon, Jakarta Indonesia Legal Center Publishing 2006.

Reni Anggriyani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan dalam Meliputi Berita di Masyarakat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

